



FORMULASI KEBIJAKAN: TAHAP AGENDA *SETTING* PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU

Dody Setyawan,^{a1} Firman Firdausi,^{b2}

^aProgram Study Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

^bProgram Study Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

E-mail: ¹dodyuni3@gmail.com, ²firman.firdausi.88@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-07-2021
Disetujui: 08-08-2021
Dipublikasikan: 29-09-2021

Kata Kunci:

1 *Agenda Setting*
2 Formulasi Kebijakan
3 Pendirian Sekolah Negeri

Keyword:

1 *agenda Setting*
2 *Policy*
3 *Public School*

ABSTRAK

Abstrak: Visi misi Kepala Daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Kota ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah pendidikan sebagai bentuk pembangunan sumber daya manusia. Zonasi membawa dampak pada keterjangkauan peserta didik dengan sekolah, khususnya sekolah negeri. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya tampung sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembangunan infrastruktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan status Negeri dalam tahapan *agenda setting*. Dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dan analisis data model interaktif yang dipopulerkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014), hasilnya pembangunan infrastruktur SMP Negeri sangat diperlukan terutama di daerah yang terdampak zonasi.

Abstract: *The vision and mission of the Regional Head is one of the keys to the success of development in this city. One aspect that is of concern to the government is education as a form of human resource development. Zoning has an impact on the affordability of students to schools, especially public schools. This indirectly affects the capacity of the school. This study aims to determine the urgency of developing junior high school (called SMP) infrastructure with state status in the agenda setting stage. This research using mixed methods and interactive model data analysis. Interactive data analysis are popularized by Miles, Huberman and Saldana (2014), the result is that the infrastructure development of public junior high schools is needed, especially in areas affected by zone-political.*



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang sangat fundamental bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Negara hadir dan mendukung sepenuhnya aspek pendidikan ini karena mengetahui begitu pentingnya dampak pembangunan sumber daya manusia bagi kemajuan Negara. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki perencanaan dalam mewujudkan suasana belajar maupun kegiatan pembelajaran untuk membangun potensi manusia yang berlandaskan pada kekuatan spiritual, pengendalian diri, akhlak yang mulia dan ketereampilan yang berdasarkan kepada kemampuan individu manusia. Sedangkan sarana pendidikan merupakan sarana terpenting dan mendasar bagi manusia untuk belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan juga mempunyai arti penting bagi manusia, karena dengan pendidikan dapat memberikan

keterampilan, pengetahuan dan nilai-nilai pada masyarakat. Peran pendidikan juga menstimulir dan menyertai perubahan-perubahan serta perkembangan yang ada di masyarakat.

Salah satu tujuan pembangunan dapat dilalui dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Bahwa mengikutsertakan pendidikan dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya adalah kebijakan wajib belajar 9 tahun. Usaha peningkatan wajib belajar 9 tahun tersebut dilakukan antara lain dengan mengembangkan pendidikan alternatif. Permasalahan pendidikan di Kota Batu berdasarkan profil pendidikan Tahun 2015 dapat dilihat dari tiga hal yaitu pemerataan, peningkatan mutu, dan efisiensi internal.

Pada tahun 2017, jumlah SD/MI baik negeri maupun swasta tercatat sejumlah 89 sekolah. Tingkat SLTP/MTs terdapat 31 sekolah baik negeri maupun swasta, sedangkan tingkat SLTA/MAN termasuk SMK sejumlah 25 sekolah. Sedangkan jumlah murid untuk SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MAN masing-masing 19.029, 9.978 dan 9.714 orang. Selama tahun 2017 rasio murid terhadap guru untuk tingkat SD sebesar 16,40 ini berarti seorang guru mempunyai tanggungjawab untuk membimbing murid sebanyak 16 orang. Untuk tingkat SLTP dan SLTA masing-masing rasionya sebesar 14,96 dan 13,16. Dari angka tersebut nampak bahwa beban guru SD lebih berat dibandingkan dengan guru SLTP dan SLTA (Dokumen RKPD, 2019).

Data pendidikan di Kota Batu menunjukkan Pencapaian ketersediaan fasilitas pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah untuk tingkat SD pada tahun 2017 sebesar 213,81 ini mengandung arti bahwa setiap sekolah SD di Kota Batu menampung murid sebanyak 214 orang. Untuk tingkat SLTP dan SLTA rasio murid terhadap sekolah masing-masing sebesar 321,87 dan 388,56. Rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator untuk mengetahui tingkat pendidikan yang telah dicapai. Rata-rata lamanya sekolah untuk Kota Batu selalu mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah 8,44 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,45 tahun pada tahun 2016 dan tahun 2017. mencapai 8,46. Hal ini mengandung arti bahwa pada tahun 2017 penduduk Kota Batu yang berusia 15 tahun keatas rata-rata menempuh pendidikan formal selama 8,46 tahun atau setara SMP (Dokumen RKPD, 2019).

Penduduk Kota Batu yang tamat SLTA atau yang sederajat pada tahun 2017 sebesar 29,18 persen sedangkan yang menamatkan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi mencapai 8,93 persen. Selain itu penduduk Kota Batu yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD sebesar 17,83 persen pada tahun 2017. Prosentase penduduk Kota Batu yang terbesar tamat sekolah sampai tingkat sekolah menengah atas yaitu sebesar 29,18 persen pada tahun 2017. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batu untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2017 sebesar 100,00 persen yang berarti untuk semua anak usia sekolah dasar sudah mengenyam pendidikan. Selanjutnya APS untuk usia SMP (13-15 tahun) sebesar 98,51 persen. Dan APS untuk usia SMA (16-18 tahun) sebesar 83,43 persen. Hanya APS untuk usia SMP (13-15) yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yaitu mencapai 98,51 persen.

Berlakunya Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB, di mana tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan formulasi sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan Daya tampung dari peserta didik baru pada jalur zonasi yang pada awalnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Berkenaan dengan Daya tampung peserta pada jalur prestasi yang semula paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah menjadi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

Hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pemerataan pelayanan pendidikan di mana bahwa pelaksanaan sistem zonasi harusnya disertai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang bisa mengakomodir semua peserta didik yang ada.

Dengan memperhatikan kondisi dan pemanfaatan dari Kebutuhan Sekolah SMP di Kota Batu khususnya di Kecamatan Junrejo sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2019 dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, maka dirasa perlu dilakukan penelitian tentang formulasi kebijakan, khususnya tahapan agenda setting dalam proses pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri di salah satu wilayah Kota Batu yang tidak terjangkau dengan sistem zonasi.

Kebijakan publik selalu tentang keputusan negara atau pemerintah untuk mengubah kondisi yang sudah ada ke arah kondisi yang lebih baik karena tugas membuat kebijakan publik adalah tugas negara, (Nugroho, 2020). Tujuan dari kebijakan publik adalah menyelesaikan permasalahan publik, bukan menciptakan masalah publik baru. Kebijakan tentang apa yang mungkin dapat dilakukan, kebijakan adalah tentang masalah sosial dalam kehidupan manusia, (Dunn, 1998; Parsons, 2005).

Definisi konseptual menurut Dunn (1998) memiliki makna bahwa kebijakan publik merupakan yurisdiksi pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang ada. Pada dasarnya kebijakan publik merupakan *logic of inquiry*, bahwa sudah sifat manusia untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sifat manusia ini tertuang ke dalam bentuk kebijakan publik yang diambil alih yurisdiksinya dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan dimana pola-pola tertentu harus dipenuhi untuk dapat dituangkan ke dalam kebijakan formal. Tahapan yang paling krusial adalah *agenda setting*. Agenda setting merupakan salah satu fase dimana di dalamnya terdapat proses yang strategis dan fundamental dalam realitas masalah publik, (Parsons, 2005; Kingdon, 2014). Pada proses ini memiliki ruang untuk menterjemahkan, mensortir, dan mengklasifikasikan segala bentuk masalah publik. Masalah publik yang perlu diangkat harus bersifat prioritas, mengandung unsur mendesak dan kritis, mendapatkan perhatian masyarakat secara luas, dalam tahap inilah diperlukan komitmen dan kemauan politik dari pemerintah.

Apabila isu berhasil mendapatkan perhatian pemerintah, berhasil menjadi masalah publik, maka isu tersebut akan meningkat menjadi agenda pemerintah, kemudian berhak mendapatkan alokasi sumber daya lebih daripada isu lain, tahap inilah disebut sebagai agenda setting.

Parsons (2005) mengemukakan bahwa tahapan agenda setting dilakukan setelah masalah publik di definisikan. Pada penelitian ini yang difokuskan kepada tahap *agenda setting* yang merupakan bertemunya semua kepentingan, Kingdon (2014) menyebutnya *sup purba (Primeval Soup)*. Dalam tahap ini terdapat beberapa kriteria sehingga permasalahan yang di angkat termasuk ke dalam kategori kritis, penting dan strategis dan memerlukan tindakan untuk diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan *mixed methods*; kualitatif dan kuantitatif, (Creswell, 2009). Penelitian kualitatif diperlukan untuk menemukan permasalahan secara detail dan holistik dalam memetakan masalah dilapangan. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Batu fokus pada proses *agenda setting* tentang pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri oleh Pemerintah Kota Batu. Jangka waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 6 bulan untuk dapat mengumpulkan data dan memproses data. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, pertimbangan utama adalah aktor-aktor pemerintah dan non pemerintah, meliputi; Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan, DPRD Kota Batu, Dewan Pendidikan, Kepala Desa, Kepala Sekolah SMP Swasta Kota Batu, Tokoh Masyarakat dan Akademisi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Penelitian kuantitatif digunakan untuk analisa SWOT bertujuan mengetahui kekuatan perencanaan pengembangan sumber daya manusia melalui kuesioner dan EFAS (*External Factors Analysis Summary*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda Kebijakan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Kota Batu

Tahap agenda setting adalah tahap menentukan isu publik atau biasa juga disebut sebagai isu kebijakan menjadi agenda pemerintah. Karakter kebijakan dalam fase agenda setting ini merupakan fase yang rapuh. Tidak selalu masalah publik yang masuk ke dalam fase ini kemudian dapat dengan lancar ataupun lolos menjadi sebuah kebijakan publik (Parsons, 2005; Kingdon, 2014). Hal ini karena faktor aktor politik atau pemerintahan yang memegang kendali masih mengukur skala prioritas pada masalah publik yang di tunjukkan kepadanya. Misalkan pada penyiapan rancangan undang-undang yang sudah disiapkan legislator ternyata berhenti sebelum disetujui baik ditunda dalam waktu yang lama maupun berhenti sama sekali (Dunn, 1998). Tahap agenda kebijakan pada dasarnya adalah untuk menarik perhatian para aktor kebijakan ini untuk mendapatkan prioritas. Tahap ini seringkali dikenal ke dalam istilah perumusan masalah. Melalui perumusan masalah ini dapat memasok segala pengetahuan dalam memperoleh informasi tentang masalah publik.

Identifikasi *policy agenda* yang pertama adalah masalahnya (Widodo, 2009). Pada pemerintah Kota Batu yang menjadi permasalahan adalah pendirian fasilitas Sekolah Menengah Pertama dengan status

Negeri. Pendirian sekolah di tengah sistem zonasi menjadi suatu tantangan baru terutama yang berstatus sekolah negeri. Sekolah swasta pada dasarnya tidak kena dampak dari kebijakan zonasi, namun keberadaan sekolah negeri yang berdekatan dalam jarak atau lokasi dengan sekolah swasta justru memiliki dampak yang harus di masukkan ke dalam daftar inventaris masalah dalam penelitian ini.

Hal yang menjadi masalah publik yang kedua adalah ketersediaan sekolah negeri di tingkat SMP. Berdasarkan angka APS (Angka Partisipasi Sekolah) Kota Batu dalam RPJM 2017-2022, angka paling tinggi di dominasi pada level SMP. Sintesa dari permasalahan zonasi sekolah yaitu banyaknya angka yang mendominasi SMP ini karena banyaknya siswa yang berasal dari luar Kota Batu yang berdempetan seperti daerah Kabupaten Malang yang justru melanjutkan sekolah di Kota Batu.

Pada sistem zonasi pendidikan, Kota Batu sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan karena wilayahnya yang tidak terlalu luas cukup mumpuni dalam memberikan sarana pendidikan. Justru masyarakat dari luar wilayah Kota Batu seperti Kabupaten Malang banyak yang sebagian masuk ke Kota Batu dan di dominasi pada Sekolah Menengah Pertama.

Tabel. 1
Jumlah Lulusan SD/MI Kecamatan Junrejo Tahun 2018

NO	NAMA SEKOLAH	JKS	JMB	JMLB	JTM
1	SDN BEJI 01	59	56	3	0
2	SDN BEJI 02	27	24	2	1
3	SDN BEJI 03	21	19	2	0
4	SDN DADAPREJO 01	43	35	8	0
5	SDN DADAPREJO 02	19	17	2	0
6	SDN JUNREJO 01	77	67	10	0
7	SDN JUNREJO 02	51	43	7	1
8	SDN MOJOREJO 01	30	27	3	0
9	SDN MOJOREJO 02	36	31	5	0
10	SDN PENDEM 01	88	70	18	0
11	SDN PENDEM 02	40	30	10	0
12	SDN TLEKUNG 01	22	17	5	0
13	SDN TLEKUNG 02	24	24	0	0
14	SDN TORONGREJO 01	28	26	2	0
15	SDN TORONGREJO 02	10	7	3	0
16	SDN TORONGREJO 03	29	29	0	0
17	SD SABILUL KHOIR	5	5	0	0
18	MI AS SALAM	20	16	4	0
19	MI DARUL HIKAM	14	8	6	0
20	MI ISKANDAR SULAIMAN	54	33	21	0
21	MI NURUL IMAN	12	2	10	0
TOTAL		709	586	121	2

Sumber : Dokumen Peta RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030, dianalisis

Keterangan :

- JKS : Jumlah keseluruhan siswa
JMB : Jumlah Siswa yang melanjutkan di Batu
JMLB : Jumlah Siswa yang melanjutkan di luar kota Batu
JTM : Jumlah Siswa tidak melanjutkan

Pada tabel 1, tentang jumlah lulusan dari Kecamatan Junrejo menjadi penyumbang siswa SMP terbanyak di Kota Batu. Hal ini belum termasuk adanya pendaftar dari luar Kota Batu. Sekolah Negeri menjadi pilihan pertama masyarakat lokal yang dalam kebijakan pemerintah sekarang sekolah negeri banyak di gratiskan melalui beberapa bantuan seperti BOS dan bantuan-bantuan lainnya. Oleh karena itu bagi kalangan tertentu banyak meminati sekolah negeri daripada sekolah swasta.

Dampak dari kebijakan zonasi skala nasional dan keminatan pada sekolah negeri membuat Pemerintah Kota Batu sebagai aktor kebijakan mengharuskan membuat kebijakan pembangunan sekolah negeri di salah satu daerah di Kota Batu. Berdasarkan *public issue* dan data-data yang diperoleh. Kurangnya pembangunan Sekolah Menengah Pertama di Kota Batu menjadikan ini sebagai masalah yang mengemuka.

Perumusan masalah menampung segala hal yang di rencanakan dalam menarik keputusan aktor kebijakan. Pada masalah publik yang di alami daerah Kota Batu di inventarisir pada beberapa variable untuk kemudian di analisis melalui metode perumusan masalah. Peneliti menggunakan metode analisis klasifikasi dan *brainstorming* (Dunn,1998), dalam memberikan saran dan rekomendasi pendirian sekolah menengah pertama di Kota Batu.

Metode analisis klasifikasi merupakan metode yang memperjelas konsep yang digunakan dalam membagi permasalahan. Analisis ini dibagi menjadi dua tahap penting yaitu pembagian logis dan klasifikasi logis (Wang;Ruhe, 2009). Pembagian logis lebih mengarah kepada membagi kelas daripada permasalahan tersebut. Klasifikasi logis lebih mengarah kepada pengkombinasian situasi, obyek atau seseorang ke dalam kelas tersebut.

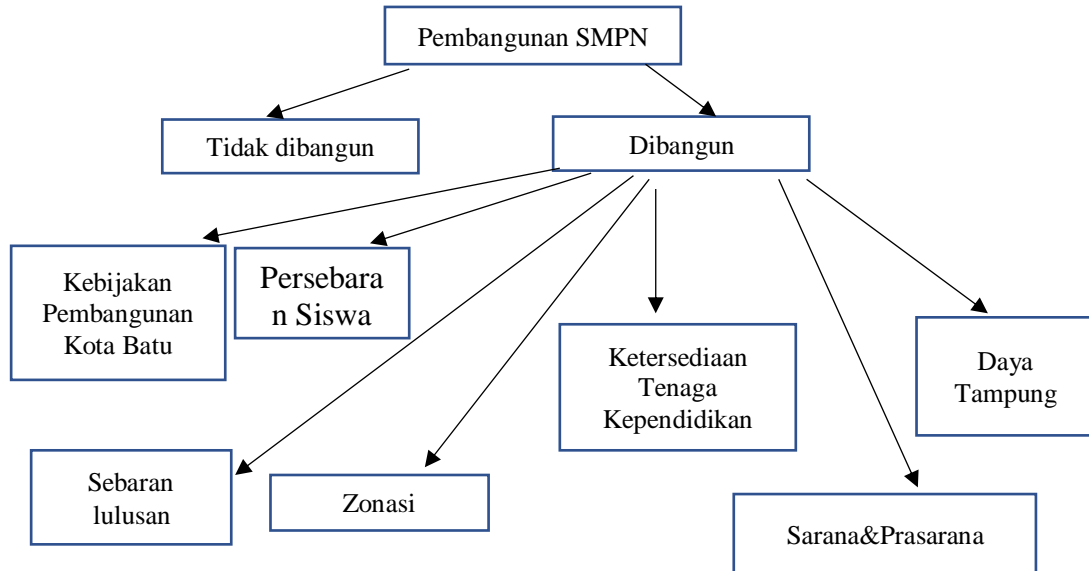
Pada pembagian logis, obyek ditemukan menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Kebijakan Pembangunan Kota Batu;
2. Persebaran siswa di Kota Batu;
3. Ketersediaan Tenaga Pendidikan;
4. Daya tampung/Pagu;
5. Sebaran lulusan
6. Zonasi SMP Negeri Kota Batu;
7. Sarana dan Prasarana

Setelah ditemukan kelas tersebut maka dapat digunakan teknik pengambilan keputusan *why-why* diagram untuk kemudian di *brainstorming* (Dermawan, 2004).

Bagan 1.

***Brainstorming* Perumusan Masalah Pembangunan Infrastruktur SMP Negeri**



Sumber : Hasil Analisis (FGD) 2019

Pada *brainstorming* tersebut maka aktor kebijakan terutama pengambil keputusan dapat memetakan kepentingan dan konsekuensi logis dari pembangunan SMPN di Kota Batu dan perlu digunakan klasifikasi logis jika keputusan pembangunan ini di setuju. Isu publik merupakan bahan yang penting bagi problem stream. Problem stream dipergunakan dalam memetakan aktor, masalah secara garis besar, dan mengkalsifikasikan masalah. Kelemahan dari problem stream merupakan hal yang harus di anulir bagi para perancang kebijakan publik (Eki, 2015).

Kesesuaian dengan Kebijakan Rencana Pembangunan Kota Batu

Analisis agenda setting pertama berdasarkan pada studi perencanaan pembangunan SMP Negeri Kota Batu yang terdapat pada 2 dokumen terkait perencanaan Kota Batu. Dokumen Perencanaan tersebut yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022.

Tabel. 2
Analisa Kebijakan

No	Kebijakan	Materi	Analisa
1	Perda Kota Batu Nomor 7 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030	1. <i>Bagian Wilayah Kota II meliputi Kecamatan Junrejo dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo</i> sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi , dan sebagai pusat perdagangan kecamatan. 2. <i>Rencana pelayanan umum</i>	Berdasarkan kebijakan Kecamatan Junrejo tidak disebutkan secara eksplisit rencana penambahan sekolah menengah pertama namun dalam dokumen tercantum bahwa kecamatan Junrejo sebagai pusat pelayanan

No	Kebijakan	Materi	Analisa
		Kawasan pendidikan meliputi pendidikan gratis di Desa Bumiaji dan pendidikan tinggi di Desa Junrejo	pendidikan tinggi sehingga sesuai jika akan dibangun SMPN
2	RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022	<p>Visi</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera <p>Misi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal; • Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia • Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata • Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional 	berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Batu tahun 2017-2022 Pembangunan SMPN di Kecamatan Junrejo masuk kedalam Misi Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.

Sumber : Dokumen RPJMD, 2017-2022 Kota Batu.

Berdasarkan tabel. 2, bahwa analisa dalam perencanaan jangka menengah Kota Batu (RPJMD) menunjukkan bahwa dalam strategi perencanaan sebenarnya tidak terencana secara eksplisit ke dalam perencanaan ke depan. Hal ini disebabkan tidak direncanakannya pembangunan sekolah ke dalam RPJMD Kota Batu. Pada visi misi Kepala Daerah terpilih cukup jelas di dalamnya tercantum pembangunan kualitas sumber daya manusia yang di dalam ruang lingkupnya mencakup pendidikan.

Pada Kebijakan Pembangunan Kecamatan Junrejo tidak disebutkan secara eksplisit pembangunan sekolah dalam strategi perencanaan. Hal ini yang menjadi kendala dalam agenda setting pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Negeri di Kota Batu. Jika di telaah rinci di dalam kalimat pembangunan tersebut adalah “pendidikan tinggi”. Pendidikan tinggi merupakan skala perguruan tinggi dan bukan skala sekolah menengah. Oleh karena itu dalam agenda setting perlu adanya analisa lebih lanjut tentang kebutuhan pembangunan sekolah menengah di daerah Junrejo Kota Batu

Metode analisis asumsi memberikan gambaran secara utuh dalam pemberian solusi terbaik pada perumusan masalah kebijakan. Analisis asumsi memberikan gambaran berdasarkan konflik atau negatif dari solusi asli yang ditawarkan. Oleh karena itu dalam memberikan gambaran analisis ini cukup

memberikan gambaran yang komprehensif. Analisis asumsi dilakukan dengan lima tahap prosedur yaitu identifikasi pelaku kebijakan, memunculkan asumsi, mempertentangkan asumsi, mengelompokkan asumsi, dan sintesis asumsi.

Analisa Persebaran Siswa

Persebaran siswa di Kota Batu secara umum dikelola oleh beberapa lembaga sesuai kewenangannya. Untuk Siswa SD sampai SMP dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota/Daerah sedangkan SMA dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk MI dan MTs dikelola oleh Kementerian Agama Kota/Daerah sedangkan MA dikelolan Kementerian Agama Provinsi.

Tabel. 3
Persebaran Siswa di Kota Batu Tahun 2015-2019

Kecamatan	Jenjang	Jumlah Siswa				
		2015	2016	2017	2018	2019
Batu	SD	7430	7284	7378	7494	7557
	SMP	5414	5415	5396	5336	5236
	SMA	2352	2533	2510	2646	2858
	SMK	3370	3924	4169	4121	3370
Bumiaji	SD	4281	4304	4246	4271	4309
	SMP	1529	1566	1548	1566	1668
	SMA	124	115	237	381	423
	SMK	633	661	707	675	633
Junrejo	SD	3806	3813	3824	3890	3898
	SMP	1218	1281	1251	1224	1178
	SMA	851	901	949	965	1010
	SMK	200	184	201	253	200
Kota Batu	SD	15517	15401	15448	15655	15764
	SMP	8161	8262	8195	8126	8082
	SMA	3327	3549	3696	3992	4291
	SMK	4203	4769	5077	5049	4203

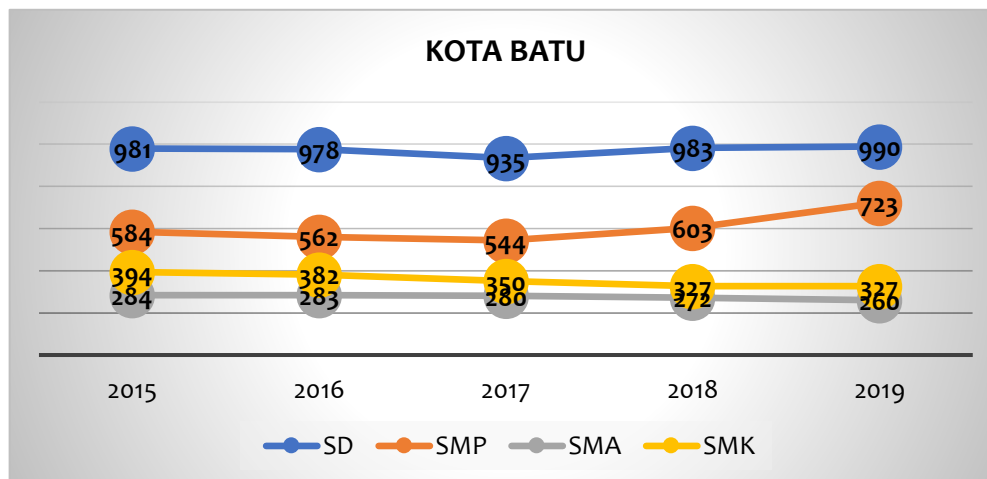
Sumber: Hasil olah data, 2019.

Pada tabel. 3, tentang analisa persebaran Kota Batu menampakkan jumlah siswa yang menduduki Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki proporsi paling besar di Kota Batu. Data kebutuhan ini adalah data yang paling logis tentang pemenuhan kebutuhan fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mulai dari Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo di dominasi peserta didik di tingkat menengah pertama selama lima tahun berturut-turut. Berdasarkan RPJMD Kota Batu 2017-2022 angka partisipasi sekolah (APS) dunia pendidikan memang pada dasarnya meninggi di Sekolah Menengah Pertama. Prioritas mengejar sekolah paling tinggi adalah pada jenjang ini. Pada kategori kejar paket B (setara dengan SMP) pun mencapai angka 99 persen.

Analisa Ketersediaan Tenaga Pendidik untuk Pembangunan SMPN

Persebaran Tenaga Pendidik di Kota Batu secara umum dikelola oleh beberapa lembaga sesuai kewenangannya. Untuk Siswa SD sampai SMP dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota/Daerah sedangkan SMA dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk MI dan MTs dikelola oleh Kementerian Agama Kota/Daerah sedangkan MA dikelola Kementerian Agama Provinsi.

Gambar. 1.
Trend Perkembangan Tenaga Pendidik di Kota Batu Tahun 2015-2019



Sumber: Hasil olah data, 2019.

Analisa Daya Tampung

Analisa daya tampung digunakan untuk memetakan sekolah baik negeri maupun swasta yang kelebihan maupun kekurangan siswa. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memetakan klasifikasi sekolah.

Tabel. 4
Daya Tampung SMP/MTs Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas 7	Daya Tampung Siswa (Pagu)	Perolehan Calon Siswa	Siswa Lebih	Siswa Kurang
1	SMPN 01 BATU	10	320	320		
2	SMPN 02 BATU	10	320	320		
3	SMPN 03 BATU	10	320	320		
4	SMPN 04 BATU	7	224	280	56	
5	SMPN 05 BATU	2	64	49		-15
6	SMPN 06 BATU	6	192	256	64	
7	SMPN SATAP GUNUNG SARI	1	32	22		-10
8	SMPN SATAP PESANGGRAHAN	1	32	32		
9	MTSN BATU	10	320	346	26	
TOTAL		57	1824	1945	121	

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Berdasarkan analisa daya tampung diketahui bahwa SMPN 5 Batu dan SMP Satap Gunungsari merupakan sekolah negeri yang kekurangan siswa sedangkan SMP 4 dan SMP 6 merupakan sekolah negeri yang kelebihan siswa. Pada sekolah swasta hanya SMP Muhammadiyah 8 yang memiliki kelebihan murid sedangkan seluruh sekolah swasta lainnya kekurangan murid kecuali SMP Al Izzah yang menerima murid sesuai pagu.

Analisa Sebaran Lulusan

Analisa sebaran lulusan merupakan analisa yang memetakan sekolah yang dituju oleh lulusan SD atau MI. Analisa sebaran lulusan memetakan potensi jumlah siswa yang akan dan masuk jenjang SMP. Adanya pemetaan sebaran lulusan ini akan diketahui arus atau aliran potensi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang setelahnya sehingga akan memberikan masukan pada pembangunan SMP Negeri Batu.

Tabel. 5
Jumlah Kelas VI Sekolah Dasar Kecamatan Batu Tahun Pelajaran 2018/2019

No	Nama Sekolah	Status	L	P	Total
1	SD NEGERI NGAGLIK 01	Negeri	<u>45</u>	<u>49</u>	<u>94</u>
2	SD NEGERI NGAGLIK 03	Negeri	<u>7</u>	<u>11</u>	<u>18</u>
3	SD NEGERI NGAGLIK 04	Negeri	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>24</u>
4	SD NEGERI NGAGLIK 2	Negeri	<u>23</u>	<u>30</u>	<u>53</u>
5	SDN ORO-ORO OMBO 3	Negeri	<u>18</u>	<u>6</u>	<u>24</u>
6	SDN ORO-ORO OMBO 1	Negeri	<u>12</u>	<u>22</u>	<u>34</u>
7	SDN ORO-ORO OMBO 2	Negeri	<u>26</u>	<u>38</u>	<u>64</u>
8	SD NEGERI PESANGGRAHAN 01	Negeri	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>25</u>
9	SD NEGERI PESANGGRAHAN 02	Negeri	<u>13</u>	<u>9</u>	<u>22</u>
10	SD NEGERI SIDOMULYO 01	Negeri	<u>13</u>	<u>9</u>	<u>22</u>
11	SD NEGERI SIDOMULYO 02	Negeri	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>31</u>
12	SD NEGERI SIDOMULYO 03	Negeri	<u>23</u>	<u>20</u>	<u>43</u>
13	SD NEGERI SISIR 01	Negeri	<u>17</u>	<u>26</u>	<u>43</u>
14	SD NEGERI SISIR 02	Negeri	<u>15</u>	<u>8</u>	<u>23</u>
15	SD NEGERI SISIR 03	Negeri	<u>25</u>	<u>19</u>	<u>44</u>
16	SD NEGERI SISIR 04	Negeri	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
17	SD NEGERI SISIR 05	Negeri	<u>31</u>	<u>31</u>	<u>62</u>
18	SD NEGERI SISIR 06	Negeri	<u>17</u>	<u>21</u>	<u>38</u>
19	SD NEGERI SONGGOKERTO 01	Negeri	<u>10</u>	<u>18</u>	<u>28</u>
20	SD NEGERI SONGGOKERTO 02	Negeri	<u>10</u>	<u>18</u>	<u>28</u>
21	SD NEGERI SONGGOKERTO 03	Negeri	<u>13</u>	<u>5</u>	<u>18</u>
22	SD NEGERI SUMBEREJO 01	Negeri	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>16</u>
23	SD NEGERI SUMBEREJO 02	Negeri	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>18</u>
24	SD NEGERI SUMBEREJO 03	Negeri	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>18</u>
25	SD NEGERI TEMAS 01	Negeri	<u>45</u>	<u>34</u>	<u>79</u>
26	SD NEGERI TEMAS 02	Negeri	<u>8</u>	<u>13</u>	<u>21</u>
27	SD CITRA BUNDA	Swasta	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>21</u>
28	SD IMMANUEL	Swasta	<u>20</u>	<u>21</u>	<u>41</u>
29	SD INTEGRAL ALFATTAH	Swasta			
30	SD ISLAM ABI	Swasta	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>7</u>

No	Nama Sekolah	Status	L	P	Total
31	SD ISLAM AL HUDA	Swasta	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>8</u>
32	SD K SANG TIMUR	Swasta	<u>33</u>	<u>31</u>	<u>64</u>
33	SD MUHAMMADIYAH 04 BATU	Swasta	<u>76</u>	<u>54</u>	<u>130</u>
34	SD MUSLIM CENDEKIA	Swasta			
35	SD PLUS AL IRSYAD	Swasta	<u>32</u>	<u>34</u>	<u>66</u>
36	SD-IT IBNU HAJAR	Swasta	<u>10</u>	<u>16</u>	<u>26</u>
37	SDIT TAHFIDZ AL MUNAWWAR	Swasta	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	Total		639	638	1277

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Analisa Perencanaan Pembangunan SMPN Kota Batu

Perencanaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pertama kali dalam pengambilan keputusan pemabgunan. Pada analisa perencanaan pembangunan di sini menggunakan analisa SWOT (David, 2004). Dalam menentukan matriks dan tabel SWOT terlebih dahulu dirumuskan potensi dan permasalahan terkait perencanaan pembangunan SMPN Kota Batu meliputi:

a. Potensi

1. Jumlah potensi siswa untuk masuk ke jenjang SMP cukup besar
2. Biaya untuk sekolah negeri terbilang lebih murah sehingga memudahkan masyarakat yang kurang mampu
3. Pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Batu khususnya kecamatan Junrejo
4. Penambahan sekolah akan meningkatkan daya saing untuk meningkatkan kualitas tiap sekolah
5. Memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat
6. Terdapat SMP Diponegoro yang berpotensi untuk dikembangkan
7. Di desa Dadaprejo sudah terdapat sekolah yang menggunakan tanah desa
8. jumlah sekolah negeri dan swasta masih dapat menampung jumlah siswa
9. Pembangunan SMPN didukung oleh kebijakan daerah berupa arahan pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Junrejo
10. Menambah jumlah rombel sehingga sekolah negeri yang sebelumnya menerima murid melebihi pagu dapat kembali sesuai dengan kapasitas
11. mulai tahun 2020 SMP Diponegoro akan disiapkan menggunakan dana desa.

b. Permasalahan

1. Adanya pembangunan SMPN akan membuat sekolah swasta kehilangan murid
2. Adanya wilayah yang tidak tercover oleh zonasi sehingga siswa hanya memiliki pilihan ke sekolah
3. kecenderungan masyarakat yang negeri minded
4. di Tlekung jumlah murid lebih banyak dibandingkan daya tampung sekolah dimana hanya terdapat SD
5. jumlah guru swasta akan berkurang seiring menurunnya jumlah murid sekolah swasta
6. adanya zonasi membuat murid menjadi heterogen sehingga guru dituntut untuk memberikan effort yang lebih
7. Regulasi terkait zonasi yang masih belum pasti di tahun yang akan datang
8. Pemberian regulasi dari pusat bersifat satu arah sehingga terkadang belum tentu sesuai dengan daerah
9. kesejahteraan guru swasta masih terbilang rendah dimana gaji yang didapatkan tidak sebanding usaha yang di keluarkan

Berdasarkan perencanaan dapat di lihat ke dalam tabel matriks (tabel 7) yang terdapat analisa dari variabel SWOT tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dalam Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan SMP Negeri Kota Batu berupa potensi yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sekarang atau masa depan baik variabel yang dapat dikendalikan atau tidak (Wang Ruhe, 2007).

Tabel. 6.
Matriks SWOT Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pembangunan SMP Negeri

<p><i>INTERNAL</i></p> <p><i>EKSTERNAL</i></p>	<p>STRENGTH (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah potensi siswa untuk masuk ke jenjang SMP cukup besar ● Biaya untuk sekolah negeri terbilang lebih murah sehingga memudahkan masyarakat yang kurang mampu ● Pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Batu khususnya kecamatan Junrejo ● Penambahan sekolah akan meningkatkan daya saing untuk meningkatkan kualitas tiap sekolah ● Memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat ● Terdapat SMP Diponegoro yang berpotensi untuk dikembangkan ● Di desa Dadaprejo sudah terdapat sekolah yang menggunakan tanah desa ● jumlah sekolah negeri dan swasta masih dapat menampung jumlah siswa 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pembangunan SMPN akan membuat sekolah swasta kehilangan murid ● Adanya wilayah yang tidak tercover oleh zonasi sehingga siswa hanya memiliki pilihan ke sekolah ● kecenderungan masyarakat yang negeri minded ● di Tlekung jumlah murid lebih banyak dibandingkan daya tampung sekolah dimana hanya terdapat SD ● jumlah guru swasta akan berkurang seiring menurunnya jumlah murid sekolah swasta ● adanya zonasi membuat murid menjadi heterogen sehingga guru dituntut untuk memberikan effort yang lebih
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan SMPN didukung oleh kebijakan daerah berupa arahan pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Junrejo ● Menambah jumlah rombel sehingga sekolah negeri yang sebelumnya menerima murid melebihi pagu dapat kembali sesuai dengan kapasitas ● mulai tahun 2020 SMP 	<p>STRENGTH – OPPORTUNITY (SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan dan pengembangan SMP Diponegoro agar dapat melayani warga yang tidak masuk kedalam zonasi ● Integrasi dan kerjasama Antara sekolah negeri dan swasta dalam melayani masyarakat dalam bentuk shaing knowledge 	<p>WEAKNESS – OPPORTUNITY (WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan SMP baru dapat dilakukan di area yang tidak terlayani dengan jumlah rombel yang terbatas agar tidak mengurangi potensi jumlah siswa di sekolah swasta ● Pembangunan SMP baru dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

Diponegoro akan disiapkan menggunakan dana desa		tidak termasuk ke dalam zonasi
THREAT (T) <ul style="list-style-type: none"> Regulasi terkait zonasi yang masih belum pasti di tahun yang akan datang Pemberian regulasi dari pusat bersifat satu arah sehingga terkadang belum tentu sesuai dengan daerah kesejahteraan guru swasta masih terbilang rendah dimana gaji yang didapatkan tidak sebanding usaha yang di keluarkan 	STRENGTH – THREAT (ST) <ul style="list-style-type: none"> peningkatan kuota penerimaan siswa melalui jalur prestasi sehingga nilai masih menjadi acuan penyusunan kebijakan zonasi berbasis kearifan lokal sehingga dapat menaggulangi permasalahan di daerah pemerataan fasilitas pendidikan termasuk pendistribusian tenaga pendidik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru 	WEAKNESS – THREAT (WT) <ul style="list-style-type: none"> pelatihan kepada tenaga pendidik baik negeri maupun swasta agar dapat beradaptasi dengan heterogenitas murid karena system zonasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik swasta dengan bekerja sama dengan tenaga pendidik sekolah negeri untuk meningkatkan mutu sekolah swasta

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Sebelumnya perlu diketahui dulu faktor internal yang mana disebut sebagai *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) dan faktor eksternal yang disebut sebagai *External Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS).

Tabel. 7
IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

Faktor Strategi Internal	Keterangan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
STRENGTH	• Jumlah potensi siswa untuk masuk ke jenjang SMP cukup besar	0,1	3	0,3
	• Biaya untuk sekolah negeri terbilang lebih murah sehingga memudahkan masyarakat yang kurang mampu	0,05	3	0,15
	• Pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Batu khususnya kecamatan Junrejo	0,1	3	0,3
	• Penambahan sekolah akan meningkatkan daya saing untuk meningkatkan kualitas tiap sekolah	0,05	3	0,15
	• Memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat	0,05	2	0,1
	• Terdapat SMP Diponegoro yang berpotensi untuk dikembangkan	0,05	3	0,15
	• Di desa Dadaprejo sudah terdapat sekolah yang menggunakan tanah desa	0,05	2	0,1
	• jumlah sekolah negeri dan swasta masih dapat menampung jumlah siswa	0,05	3	0,15
Total				1,4
Weaknesses	• Adanya pembangunan SMPN akan membuat sekolah swasta kehilangan murid	0,1	3	0,3
	• Adanya wilayah yang tidak tercover oleh zonasi sehingga	0,1	4	0,4

Faktor Strategi Internal	Keterangan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
	siswa hanya memiliki pilihan ke sekolah			
	• kecenderungan masyarakat yang negeri minded	0,1	4	0,4
	• di Tlekung jumlah murid lebih banyak dibandingkan daya tampung sekolah dimana hanya terdapat SD	0,1	3	0,3
	• jumlah guru swasta akan berkurang seiring menurunnya jumlah murid sekolah swasta	0,05	3	0,15
	• adanya zonasi membuat murid menjadi heterogen sehingga guru dituntut untuk memberikan effort yang lebih	0,05	3	0,15
Total				1,7

Sumber: Hasil olah data, 2019.

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai IFAS adalah (-) yang berarti *Weaknesses* yang ada lebih besar dari pada *Strength* yang dimiliki untuk Pembangunan SMP Negeri.

$$\begin{aligned} \text{IFAS (x)} &= \text{Strength} + \text{Weakness} \\ &= 1,4 + (-1,7) \\ &= -0,3 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai IFAS adalah (-) yang berarti *Weaknesses* yang ada lebih besar dari pada *Strength* yang dimiliki untuk Pembangunan SMP Negeri.

Tabel. 8
EFAS (External Factors Analysis Summary)

Faktor Strategi Eksternal	Keterangan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<i>Opportunity</i>	• Pembangunan SMPN didukung oleh kebijakan daerah berupa arahan pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Junrejo	0,2	4	0,8
	• Menambah jumlah rombel sehingga sekolah negeri yang sebelumnya menerima murid melebihi pagu dapat kembali sesuai dengan kapasitas	0,2	3	0,6
	• mulai tahun 2020 SMP Diponegoro akan disiapkan menggunakan dana desa	0,1	1	0,1
Total		0,5		1,50
<i>Threat</i>	• Regulasi terkait zonasi yang masih belum pasti di tahun yang akan datang	0,1	2	0,2
	• Pemberian regulasi dari pusat bersifat satu arah sehingga terkadang belum tentu sesuai dengan daerah	0,2	2	0,4
	• kesejahteraan guru swasta masih terbilang rendah dimana gaji yang didapatkan tidak sebanding usaha yang dikeluarkan	0,2	2	0,4
Total		0,5		1,00

Sumber: Hasil olah data, 2019.

$$\begin{aligned}
 \text{EFAS (y)} &= \text{Opportunity} + \text{Threat} \\
 &= 1,50 + (-1,00) \\
 &= 0,5
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai EFAS adalah (+) yang berarti *Opportunity* yang ada lebih besar dari pada *Threat* yang dimiliki untuk Pembangunan SMP Negeri.

Berdasarkan hasil perhitungan IFAS-EFAS, terletak pada kuadran IID yaitu *Selective Maintenance Strategy* dimana pengelolaan obyek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting. Adapun strategi yang dapat diterapkan adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan SMP Diponegoro agar dapat melayani warga yang tidak masuk kedalam zonasi
2. Integrasi dan kerjasama Antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam melayani masyarakat dalam bentuk *sharing knowledge*
3. Pembangunan SMP baru dapat dilakukan di area yang tidak terlayani dengan jumlah rombongan belajar yang terbatas agar tidak mengurangi potensi jumlah siswa di sekolah swasta
4. Pembangunan SMP baru dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak termasuk ke dalam zonasi
5. Peningkatan kuota penerimaan siswa melalui jalur prestasi sehingga nilai masih menjadi acuan
6. Penyusunan kebijakan zonasi berbasis kearifan lokal sehingga dapat menaggulangi permasalahan di daerah
7. Pemerataan fasilitas pendidikan termasuk pendistribusian tenaga pendidik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru
8. Pelatihan kepada tenaga pendidik baik sekolah negeri maupun sekolah swasta agar dapat beradaptasi dengan heterogenitas murid karena adanya sistem zonasi
9. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik swasta dengan bekerja sama dengan tenaga pendidik sekolah negeri untuk meningkatkan mutu sekolah swasta

PENUTUP

Berdasarkan analisa perencanaan kebijakan bahwa pembangunan infrastruktur SMP Negeri sangat diperlukan terutama di daerah yang terdampak zonasi. Aspek yang ditinjau terhadap perencanaan ini adalah kapasitas sekolah, peluang siswa sekolah dasar menuju SMP, dan yang paling menentukan adalah faktor zonasi serta tata letak keberadaan SMP Kota Batu dan SMP lintas wilayah yang menyebabkan peningkatan siswa SMP di wilayah Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. London: Sage Publication.
- Darmwan, Eki (2015). Agenda Setting dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/> (diakses tanggal 3 Agustus 2021).
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022 Kota Batu.
- Dokumen Peta RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030.
- Dokumen RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Kota Batu Tahun 2019.

- Miles, M. B., Huberman, A. M, and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications.
- Nugroho, Riant. 2020. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Politik Kebijakan, Etika Kebijakan, Kimia Kebijakan. Edisi 6*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Setyawan, Dody. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Dermawan, R. (2004). *Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta.
- David, F R. (2004). *Manajemen Strategi: Konsep-konsep. Edisi Sembilan*. Jakarta: Indeks
- Wang, Y & Ruhe, G. R. (2007). *The Cognitive Process of Decision Making*. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies. Second Edition*. USA: Pearson Education Limited.

